

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan daerah teritorial terkecil dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan yakni desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan keunikan, adat budaya serta kebiasaan yang berlaku di desa tersebut. Dalam upaya memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang adanya dana Desa. Dana desa diartikan sebagai anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016. Setiap desa harus dapat mengelola dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penemuan *Indonesian Corruption Watch*, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah tercatat 181 kasus dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp 40,6 miliar. Terdapat 17 kasus pada tahun 2015, meningkat pada tahun 2016 menjadi 47 kasus di tahun 2017 meningkat lagi lagi menjadi 96 kasus dan pada tahun 2018 terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran

desa sebagai objek korupsi (www.antikorupsi.org). Dalam penyaluran dana desa yang nominalnya cukup besar untuk setiap desa dibutuhkan kompetensi dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah masing-masing desa dalam penyelenggaraannya. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) yang selama ini ditakuti oleh pemerintah dan masyarakat (Widayarta dkk, 2017).

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan desa-desa di seluruh Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk didistribusikan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Hingga tahun ini pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 400,1 triliun dimulai dari tahun 2015-2021, anggaran dana desa terus meningkat. Setiap tahun mulai Rp. 20,8 triliun pada tahun 2015, Rp. 47 triliun pada tahun 2016, Rp. 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, Rp. 70 triliun pada tahun 2019, Rp. 72 triliun pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 anggaran dana desa mencapai Rp. 28,82 triliun yang telah di cairkan (Kementerian Keuangan, 2021).

Anggaran yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) agar dana yang dikelola ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Masalah sering muncul karena aparatur yang kompetitif dan pengawasan yang buruk terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini seringkali berujung pada kecurangan yang sudah umum terjadi di Indonesia, baik yang melibatkan pejabat pusat maupun daerah (Widayarta, Herawati dan Atmadja, 2017).

Fraud merupakan bentuk penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak lain oleh orang-orang di dalam dan di luar organisasi (Karyono, 2013). Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan *fraud* atau tindakan kecurangan. Cressey (1953) mengatakan bahwa kecenderungan akan *fraud* didasarkan pada tiga komponen yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang) dan *rationalization* (pembenaran). Ketiga faktor tersebut dikenal dengan *fraud triangle*.

Pencegahan penyelewengan (*fraud*) dapat dilakukan dengan kompetensi aparatur yang sesuai dalam pengelolaan dana. Dengan aparat yang berkompeten dalam pengelolaan dana desa, diharapkan bisa meminimalisir tindakan penyelewengan (*fraud*). Kompetensi adalah kemampuan yang sesuai untuk melakukan suatu tugas, atau dapat diartikan sebagai keterampilan yang tersedia dan keterampilan yang dibutuhkan (Suparno, 2012).

Moralitas individu juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan. Moralitas adalah nilai dan norma yang menjadi pedoman seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Semakin tinggi moral individu, semakin ia berusaha menghindari kecurangan (Udayani dan Sari, 2017). Menurut sebuah studi oleh Laksmi dan Sujana (2019), moral mempengaruhi pencegahan penipuan.

Dengan meningkatkan kualitas pengendalian intern dan mengoptimalkan sistem pengendalian intern yang baik, juga dapat mencegah terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal (SPI) sebagai sarana untuk mengelola, memantau, dan mengukur sumber daya

organisasi memainkan peran kunci dalam pencegahan dan deteksi penipuan (Pratama, 2017).

Penelitian dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Bupon yang alokasi dana desanya begitu banyak, sehingga sangat mungkin terjadi kecurangan dana desa mengingat masih banyak aparat desa yang tidak mampu mengelola keuangan desa. Untuk menghindari kecurangan, semua kepala desa dibantu dan semua aparat pemerintah desa dilatih untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa dengan baik (jatengprov.go.id).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Desa Sekecamatan Bupon, Kabupaten Luwu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut in

1.2.1 Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Bupon?

1.2.2 Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Bupon?

1.2.3 Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Bupon?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini.

1.3.1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Bupon.

1.3.2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Bupon.

1.3.3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Bupon.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut ini.

1.4.1 Bagi Pemerintah Desa Sekecamatan Bupon

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemerintah desa dalam melakukan pencegahan *fraud* (kecurangan) yang terjadi di dalam pengelolaan dana desa serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Sehingga pemerintah desa dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi.

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

2.1.2 Theory Fraud Triangle

Teori ini dicetuskan oleh *Donald R. Cressey* pada tahun 1953. *Cressey* melakukan penelitian ekstensif dengan para pelaku kejahatan yang terbukti bersalah untuk menentukan apa yang memotivasi orang tampaknya jujur untuk melakukan penipuan. Temuan *Cressey* ini akhirnya diringkas dengan sebutan *fraud triangle*. Tiga komponen dari *fraud triangle* adalah tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Ketiga komponen yang dicetuskan oleh *Cressey* dalam Priantara (2013) sebagai berikut:

a. Sisi pertama adalah tekanan (*pressure*)

Tekanan adalah dorongan untuk melakukan kecurangan. Tekanan biasanya muncul dari kebutuhan dan masalah keuangan, tetapi banyak pelaku hanya didorong oleh keserakahan.

b. Sisi kedua adalah peluang atau *opportunity*

Peluang adalah peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan atau peluang seseorang untuk melakukan penipuan.

1) Sistem pengendalian internal yang lemah (misalnya B. Jejak audit yang hilang atau kurang karena aktivitas manajemen yang tidak dapat dilacak, tidak memadai dan tidak efisien di area risiko dan proses bisnis, sistem dan kemampuan sumber

daya manusia (SDM) yang dikompensasi Kompleksitas organisasi, kebijakan dan prosedur SDM yang tidak menguntungkan bukan.

2) Kepemimpinan organisasi yang buruk dapat meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Sepertinya tidak ada komitmen yang tinggi dan contoh yang baik dari level manajemen, dan sikap manajemen yang ceroboh.

c. Sisi ketiga adalah rasionalisasi

Rasionalisasi terjadi karena seseorang mencari pembenaran untuk berbuat curang. Penipu percaya atau merasa bahwa tindakan mereka adalah hak mereka, bukan penipuan. Penjahat bahkan bisa merasa kuat karena mereka telah melakukan banyak hal untuk organisasi.

2.1.2 Kompetensi Aparatur Desa

a. Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa adalah kesanggupan, kemampuan dan kesanggupan seseorang yang bekerja pada pemerintahan desa untuk memenuhi tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai aparatur desa. Pemahaman ini didukung oleh Islamiyah dkk. (2020) Kompetensi adalah wawasan dan kemampuan yang dilakukan individu dan saling memengaruhi dalam banyak hal yang dibutuhkan organisasi.

Variabel kemampuan perangkat desa seperti :

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu terdiri dari: Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan.
- 2) Kemampuan (*skill*) yaitu terdiri dari: Keahlian teknis dan Kemampuan mencari solusi.

- 3) Sikap (*attitude*) yang meliputi: inisiatif dalam bekerja; keramahan dan kesopanan, independensi, kemampuan professional, lingkungan pekerjaan.

b. Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Variabel kompetensi aparatur desa dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Nurkhasanah, 2019)

1) Pemahaman

Kemampuan perangkat desa, perlu memahami pengelolaan dana desa.

2) Keahlian teknis

Kompetensi “aparatur desa harus memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.”

3) Pelatihan

Aparat desa "diharapkan untuk mengikuti kursus pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan laporan keuangan."

4) Inisiatif dalam bekerja

Aparat desa harus memiliki inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada.

5) Kode etik kepegawaian

Aparat desa bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai.

2.1.3 Moralitas

a. Pengertian Moralitas

Moralitas adalah sifat moral yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial, dan keseluruhan asas serta nilai yang bisa dianggap baik dan buruk oleh manusia lain yang menilainya. Moral berasal dari kata latin “mores”. Lalu Mores berasal

dari kata “mos” yang berarti kesusilaan, tabiat, atau perilaku. Sehingga moral dapat diartikan sebagai ilmu tentang kesusilaan, yang didalamnya terdapat ajaran tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya (Kurniawan,2013).

Semua perilaku/sikap manusia ditentukan oleh nilai dan prinsip moral yang dianut dan terapkan di sekitarnya. Oleh karena itu, moralitas itu sendiri adalah suatu sistem nilai/etika yang menjadi dasar bagi manusia untuk bertindak menurut adat, budaya, dan aturan yang sama. Ciri-ciri nilai moral adalah:

a) *Primer*

Moralitas adalah tugas terpenting dan dasar dari keinginan untuk bertindak menurut aturan yang berlaku dan untuk melakukan segala bentuk pekerjaan.

b) *Riil*

Nilai-nilai moral adalah nilai-nilai yang nyata, bukan sekedar nilai-nilai semu. Mereka yang tidak peduli dengan nilai-nilai moral biasanya adalah orang-orang munafik.

c) *Terbuka*

Ruang moral membutuhkan ruang terbuka karena ketika nilai moral ditutup, ia kehilangan identitasnya.

2.1.4 Pencegahan *Fraud*

a. Pengertian Pencegahan *Fraud*

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kasus *fraud*, yaitu dengan cara memperkecil peluang/kesempatan dan mempersulit langkah pelaku untuk melakukan tindakan *fraud*, menurunkan

tekanan pegawai/karyawan supaya mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri/tidak selalu merasa kekurangan atas pencapaiannya, serta mengeliminasi alasan untuk merekayasa alasan dan melakukan pembelaan diri atas tindakan menyimpang yang sudah dilakukan tersebut (Hariawan dkk, 2020).

Upaya pencegahan *fraud* ini dapat dicapai dengan memantau dan menilai kepemimpinan. Oleh karena itu, Anda dapat memprediksi terjadinya *fraud* dengan memantau dan mengevaluasi aktivitas yang telah atau belum dilakukan. Melibatkan aparat desa dalam pencegahan kecurangan dapat sangat membantu dalam mengurangi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Selain itu, regulasi pencegahan *fraud* dapat mengurangi *fraud*. Aturan pencegahan penipuan sebagai tindakan pencegahan standar mencakup berbagai langkah yang harus diberitahukan kepada karyawan untuk memastikan implementasi yang tepat. Aturan tersebut juga memberikan sanksi bagi pegawai yang berani melakukan kecurangan.

b. Indikator Pencegahan *Fraud*

Menurut Tuanakotta (2012) upaya pencegahan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan meliputi :

1) Menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan

Kesadaran untuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi dapat diawali dengan memberikan pengertian yang lebih tentang kerugian dan dampak kecurangan akuntansi. Setelah itu, seiring dengan kesadaran yang meningkat, maka diupayakan untuk menghilangkan penyebab kecurangan akuntansi.

2) Menilai resiko terjadinya kecurangan

Menilai resiko terjadinya kecurangan adalah menilai sesuatu yang kurang menyenangkan, setidaknya dari sisi akibat yang ditimbulkan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau tindakan.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu cara yang digunakan pada organisasi, lembaga ataupun instansi untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya untuk selalu tertib dan disiplin dalam mengerjakan sesuatu serta memiliki peranan penting dalam mengawasi, memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan dan hasil kerja pegawai dalam pekerjaannya yaitu dengan cara melakukan pembukuan secara teratur dan rutin maupun dengan komputerisasi, sehingga sistem pengendalian internal sangat penting dalam upaya pencegahan dan pendektasian *fraud* (Laksmi & Sujana, 2019).

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan karyawan lainnya dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Sistem pengendalian internal telah divalidasi, disederhanakan dan diimplementasikan untuk keakuratan dan keakuratan semua jenis data akuntansi untuk melindungi berbagai aset struktur organisasi, organisasi, institusi atau otoritas.

b. Indikator Pengendalian Internal

Menurut Haryono (2014) pengendalian internal terdiri dari lima komponen yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menentukan arah organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian karyawan organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari kebijakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan perilaku umum manajemen puncak, direktur, dan pemilik perusahaan dalam kaitannya dengan pengendalian internal dan kepentingannya bagi perusahaan.

2. Proses penilai resiko entitas

Proses penilaian risiko perusahaan memberikan dasar bagi manajemen untuk menentukan bagaimana mengelola risiko. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko perusahaan melibatkan manajemen yang mengidentifikasi risiko bisnis yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi perusahaan yang berlaku dan menilai pentingnya risiko bisnis tersebut. Ini termasuk cara untuk menilai kemungkinan terjadinya dan membuat keputusan. Tindakan untuk mengatasinya Respon dan pengelolaan risiko ini, dan hasil dari proses penilaian risiko.

3. Sistem informasi

Sistem informasi terdiri dari infrastruktur (komponen fisik dan perangkat keras), perangkat lunak, orang, proses, dan data. Sistem informasi yang berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan meliputi metode dan pencatatan.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu dalam memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dilakukan untuk menghadapi resiko guna tercapainya tujuan entitas.

5. Pemantauan terhadap pengendalian

Pengendalian pemantauan adalah proses menilai efektivitas implementasi internal. Memantau kontrol melibatkan memastikan bahwa kontrol bekerja sebagaimana dimaksud dan mengubah kontrol yang diperlukan untuk mencerminkan perubahan situasi.

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa khususnya aparatur desa yang terkait atas pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, yang mengharuskan bekerja dengan sepenuh keahliannya dalam mengelolah keuangan desa dengan baik dan benar sesuai harapan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota. Mengembangkan rencana pembangunan desa untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya, terdapat transaksi pendapatan dan belanja desa. Dalam lingkup penegakan kekuasaan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa.

c. Penatausahaan

Kepala desa harus menetapkan bendahar desa untuk melakukan pengelolaan keuangan. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran.

d. Pelaporan

Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 3) Pemerintah desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- 4) Pemerintah desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD.

e. Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisas pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

f. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan memantau jalannya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

g. Tahap-tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa :

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran desa.
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 3) Timbulnya sejumlah transaksi dalam pelaksanaan anggaran.
- 4) Berdasarkan transaksi kemudian akan menghasilkan sebuah neraca.
- 5) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu dalam bentuk laporan realisasi anggaran desa (Sujawwerni, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penulisan saat ini menggunakan 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anantawikrama Tungga Atmadja & Komang Adi Kurniawan Saputra/ Pengaruh Kompetensi aparatur, moralitas dan sistem Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa (2017)	Metode Kuantitatif	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Moralitas X ₃ : Sistem pencegahan <i>fraud</i> Y: Pengelolaan keuangan desa	Kompetensi aparatur, moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa
2	Ni Kadek Rai Eldayanti, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati & Ni Wayan Yuniasih/ Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan keuangan desa (2020)	Metode Kuantitatif	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Sistem pengendalian internal X ₃ : Integritas dan akuntabilitas Y: Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa
3	Putu Ayu Armelia & Made Arie Wahyuni/ Pengaruh kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal dan moral <i>sensitivity</i> terhadap	Metode Kuantitatif	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Efektivitas pengendalian internal X ₃ : Moral <i>sensitivity</i> Y: pencegahan	Kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal dan moral <i>sensitivity</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa

	pengecahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan Keuangan desa (2020)		<i>Fraud</i> pengelolaan keuangan desa	
4	Putu Santi Putri Laksmi & I Ketut Sujana/ Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pengecahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa (2019)	Metode Kuantitatif	X ₁ : Kompetensi SDM X ₂ : Moralitas X ₃ : Sistem pengendalian internal Y: Pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengecahanI dalam pengelolaan keuangan desa
5	Luh Sri Isa Dewi Jayanti & Ketut Alit Suardana/ Pengaruh kompetensi SDM, moralitas, <i>whistleblowing</i> dan SPI terhadap pengecahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa (2019)	Metode kuantitatif	X ₁ : Pengaruh kompetensi SDM X ₂ : Moralitas X ₃ : <i>whistleblowing</i> dan SPI Y: Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Kompetensi SDM, moralitas, <i>whistleblowing</i> dan SPI berpengaruh positif terhadap pengecahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa
6	I Ketut Sujana, I Made Sadha Suardhika & Putu Santi Putri Laksmi/ Pengaruh sistem <i>wistleblowing</i> , kompetensi, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pengecahan kecurangan dalam	Metode kuantitatif	X ₁ : Sistem <i>wistleblowing</i> X ₂ : Kompetensi X ₃ : Moralitas X ₄ : Sistem pengendalian internal Y: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa	Sistem <i>wistleblowing</i> , kompetensi, moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengecahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa

	pengelolaan keuangan desa (2020)			
7	Luh Ayu Marsita Dewi & I Gusti Ayu Eka Damayanthi/ Pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pada pencegahan <i>fraud</i> (2019)	Metode kuantitatif	X ₁ : Komprtensi X ₂ : Sistem pengendalian imternal Y: Pencegahan <i>fraudad</i>	Kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
8	I Made Hangga Hariawan, Ni Komang Sumadi & Ni Wayan Alit Erlinawati/ Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, <i>whistleblowing system</i> , dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan keuangan desa (2020)	Metode kuantitatif	X ₁ : Kompetensi SDM X ₂ : <i>whistblowing system</i> X ₃ : Moralitas Y: Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Kompetensi sumber daya manusia, <i>whistleblowing system</i> , dan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa
9	Klara Wonar, Syaikhul Falah & Bill J.C Pangayow / Pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem	Metode Kuantitatif	X ₁ : Kompetensi X ₂ : Ketaatan pelaporan keuangan X ₃ : Sitem pengendalian internal Y: Pencegaham <i>fraud</i>	Kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>

	pengendalian intern terhadap pencegahan <i>fraud</i> dengan moral <i>sensitivity</i> sebagai variabel moderasi (2018)		Z: Moral <i>sensitivity</i>	
10	Putu Feny Kharisma Dewi, Gede Adi Yuniarta & Made Arie Wahyuni/ Pengaruh moralitas, integritas, komitmen organisasi dan pengendalian interna kas terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (studi pada desa di kabupaten buleleng) (2017)	Metode kuantitatif	X ₁ : Moralitas X ₂ : Integritas X ₃ : Komitmen organisasi X ₄ : Pengendalian internal kas Y: Pencegahan <i>fraud</i> dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat pendapatan rendah	Moralitas. Integritas, komitmen organisasi dan pengendalian internal kas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>

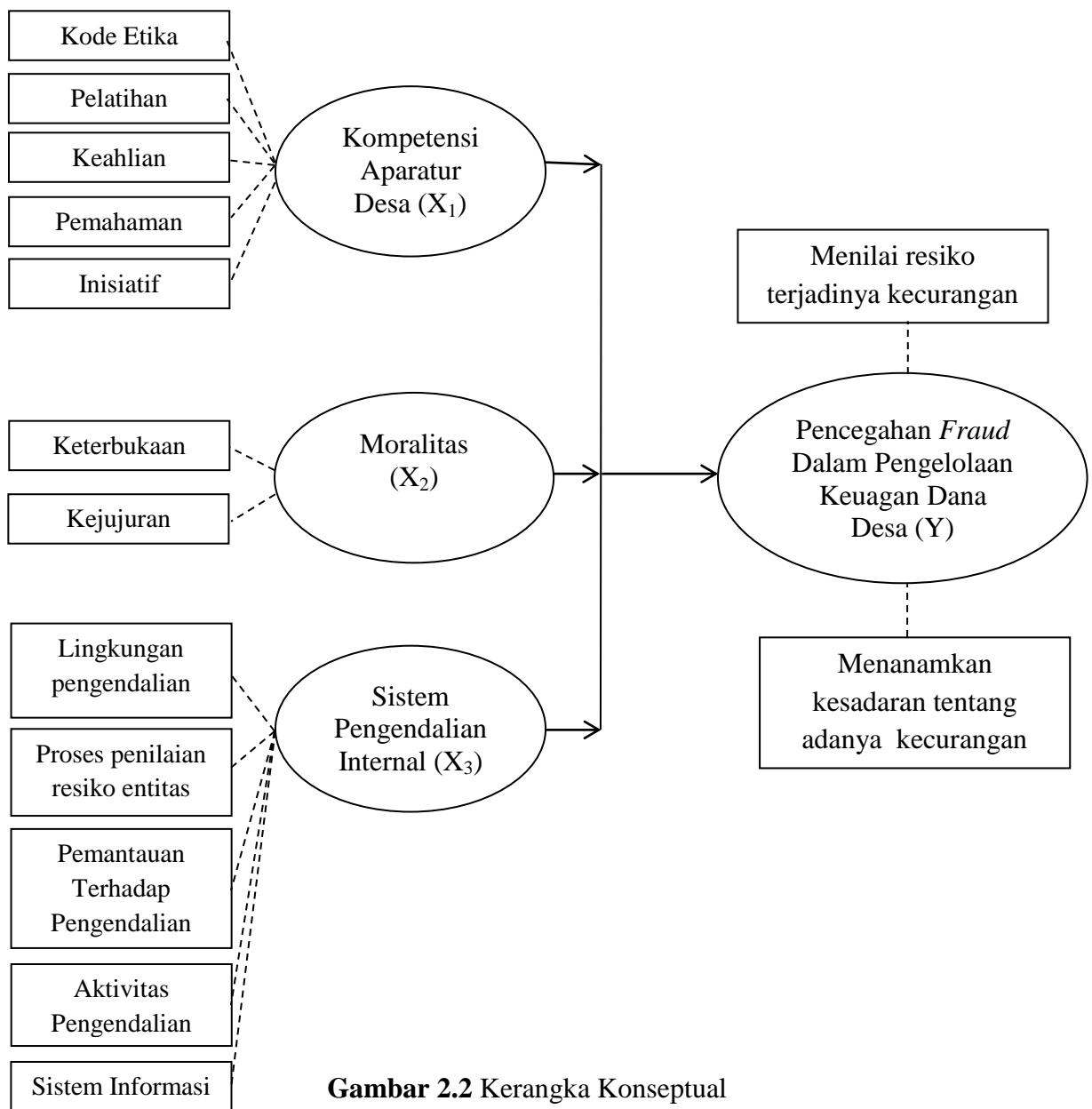
Dari tabel penelitian penelitian sebelumnya tentang pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggabungkan tiga variabel bebas yaitu kemampuan perangkat desa, semangat juang, dan sistem pengendalian intern. Selain itu, terdapat perbedaan lain dari

survei sebelumnya, sampel survei, dan target survei untuk tahun survei. Subyek survei ini dilakukan pada tahun 2022 di sebuah desa di kabupaten Bupon.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan di teliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar varabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan sugiyono (2018).

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran konseptual diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Wonar, (2018) yang menyatakan bahwa, kemampuan yang dimiliki oleh pegawai aparatur desa merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk keberhasilan tanggung jawab yang diemban. Kemampuan dasar yang sebaiknya dimiliki oleh aparatur desa yaitu, paham betul mengenai peraturan hukum yang berlaku di desa, memahami tugas fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa dan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem pengendalian yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kompetensi aparatur sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dan alokasi dana desa untuk mencegah kemungkinan terjadinya peluang adanya *fraud* dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wonar et al., (2018) juga menyatakan bahwa, kemampuan aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang lainnya. Penelitianpenelitian yang dilakukan oleh Islamiyah et al., (2020), Widiyarta et al., (2017), Purnamawati & Adnyani (2019), Saputra et al., (2019) menarik kesimpulan bahwa, kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, di mana semakin tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Melanjutkan kalimat di atas maka dapat disusun hipotesis berikut:

H₁ : Diduga kompetensi berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

2.4.2 Pengaruh Moralitas Terhadap Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Moralitas merupakan tindakan atau perilaku baik/buruk yang bersumber dari dalam diri manusia yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan organisasi. Rahimah et al., (2018) menyatakan bahwa seseorang yang menjunjung tinggi moralitas dapat menghindari terjadinya *fraud* karena seseorang yang mementingkan moral akan cenderung taat terhadap norma-norma yang berlaku sesuai dengan prinsip etika. Sedangkan, seseorang yang tidak menjunjung tinggi moralitas akan mengambil keputusan atas keinginannya sendiri dan mengabaikan kewajiban dan peraturan yang seharusnya dipenuhi. Dengan menanamkan moralitas kepada setiap individu, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019), serta Rahimah et al., (2018) bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* Tetapi hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade (2017) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

H₂ : Diduga moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Pengendalian internal yang dilaksanakan di dalam suatu organisasi mampu membantu menghindari terjadinya kecurangan. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien di bagian pengelolaan keuangan maka akan membantu organisasi dalam pencapaian tujuan. Tujuan dari organisasi pada umumnya yaitu mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia seminimal mungkin sehingga mampu menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Semakin bagus SPI suatu organisasi maka, dapat mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan karena tidak adanya peluang untuk melakukan penyelewengan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Hanafi (2018) yang menyatakan, Sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengawasi perilaku agen (aparatur atau perangkat desa) dalam merealisasikan kucuran dana desa sehingga dapat menghalangi tindakan mereka untuk memperkaya diri dengan cara mengorbankan kepentingan prinsipal (publik). Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar & Ela Elliyana (2020), Islamiyah et al., (2020), Putri dan Sujana (2019), Widiyarta et al., (2017), Jalil (2018) menyatakan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

H₃: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah suatu metode penelitian ilmiah yang sistematis yang menggunakan model matematis, teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagan-bagan maupun pada hubungannya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa sekecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang di laksanakan 3 (tiga) bulan.

3.3 Populasi dan Sempel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Penelitian ini populasi yang digunakan yaitu Aparatur Desa sekecamatan BUPON:

- a. Desa Balutan : 10 Orang
- b. Desa Buntu Batu : 9 Orang
- c. Desa Malenggang : 9 Orang
- d. Kelurahan Noling : 11 orang
- e. Desa Padang Kamburi : 9 Orang

f. Desa Padang Ma'bud	: 10 Orang
g. Desa Padang Tuju	: 10 Orang
h. Desa Saluinduk	: 11 Orang
i. Desa Tampumia	: 11 Orang
j. Desa Tanjong	: 10 Orang
Total	: 100 Orang

3.3.2 Sempel

Menurut sugiyono (2016: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka meneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan, dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

d² = Presisi (Ditetapkan 15% dengan tingkat kepercayaan 90%)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{100}{100 \cdot (0,15)^2 + 1} = 30,76 \text{ Dibulatkan menjadi } 30$$

Dengan rumus tersebut, maka diperoleh jumlah sampel yaitu :

Tabel 3.1
Perhitungan Jumlah Sempel

No	Desa sekecamatan Bupon	Sempel	
1.	Desa Balutan	=10/100*30	3
2.	Desa Buntu Batu	=9/100*30	2
3.	Desa Malenggang	=9/100*30	2
4.	Kelurahan Noling	=11/100*30	4
5.	Desa Padang Kamburi	=9/100*30	2
6.	Desa Padang Ma'bud	=10/100*30	3
7.	Desa Padang Tuju	=10/100*30	3
8.	Desa Saluinduk	=11/100*30	4
9.	Desa Tampumia	=11/100*30	4
10.	Desa Tanjong	=10/100*30	3
Total			30

Berdasarkan perhitungan semple pada tel diatas maka dapat dilihat jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 30 Orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Ada beberapa jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

3.4.1 Jenis Data

Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data primer berupa data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan pengaruh variabel independen yaitu Kompetensi (X1), Moralitas (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah kuesioner yang didapatkan dengan cara menyebarkannya kepada seluruh aparatur desa yang ada di kecamatan Bupon.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan kuesioner yang pendekatannya bersifat langsung disebarikan kepada seluruh aparatur desa yang ada di kecamatan Bupon.

3.6 Variabel Penelitian Dan Devinisi Oprasional

3.6.1 Devinisi Konseptual

a. Variabel Independen

1) Kompetensi aparatur desa

Kompetensi aparatur desa dapat diartika sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang berupa, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional.

2) Moralitas

Moralitas adalah norma-norma, nilai-nilai, dan sikap seseorang dalam perbuatan atau tindakan yang muncul dari hati. Moralitas juga terdapat pada seseorang yang mengambil yang baik karena ia sadar akan tanggungjawabnya bukan ia mencari keuntungan, dengan kata lain perbuatan yang betul-betul

3) Sistem pengendalian internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat/ perintah dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah: Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y).

3.6.2 Definisi Oprasional

Tabel 3.2 Oprasionalisasi Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1	Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan dana desa (Y)	1. Peraturan tentang <i>fraud</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan anti-<i>fraud</i> • Prosedur pencegahan baku 	Likert
		2. Pengendalian <i>fraud</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengendalian • Kepekaan terhadap <i>fraud</i> 	
2	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	1. Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang & tingkat pendidikan • Penguasaan pengetahuan dan keahlian 	Likert
		2. Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan berkarya • Prinsip-prinsip corporate governance 	
		3. Perilaku/sikap	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap dan perilaku 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Peran kemasyarakatan aparat 	
3	Moralitas (X2)	1. Attitude/ sikap	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran • Keterbukaan 	Likert
		2. Tugas dan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> • Keteptan waktu • Kinerja 	
4	Sistem pengendalian internal (X3)	1. Integritas	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan penegndalian • Peksnaksiran resiko 	Likert
		2. Pengelolaan data	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas pengendalian • Informasi dan komunikasi 	
		3. Tempat bekerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan 	

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya dalam penelitian kuantitatif adalah analisis data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini merupakan skala likert yang memiliki lima poin rating yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) : 5

Setuju (S) : 4

Kurang Setuju (KS) : 3

Tidak Setuju (TS) : 2

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

3.8 Analisis Data

1.8.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data bertujuan untuk menguji kesungguhan responden dalam menjawab butir-butir pertanyaan. Uji kualitas data terdiri dari uji reliabilitas dan validitas :

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur jawaban responden dari pernyataan dalam kuesioner dengan melihat tingkat konsistensi jawaban responden. Menurut Umar (2007:75), reliabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian, atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument penelitian. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai (α) lebih besar dari 0,60.

Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Reliabilitas uji coba $> 0,60$ maka uji coba memiliki hasil reliabilitas yang baik.
2. Reliabilitas uji coba $< 0,60$ maka uji coba memiliki hasil reliabilitas yang kurang baik.

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat menggambarkan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2016). Kuesioner penelitian dikatakan valid jika nilai signifikansi $< 0,05$. Kriteria pengujian apabila nilai *pearson correlation* $< r$ table maka item pernyataan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *pearson correlation* $> r$ table maka item pernyataan dikatakan valid.

1.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif kepada variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Nilai yang diramalkan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi untuk X_1

β_2 = Koefisien regresi untuk X_2

β_3 = Koefisien regresi untuk X_3

X_1 = Kompetensi

X_2 = Moralitas

X_3 = Sistem pengendalian internal

e = Nilai residu

1.8.3 Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikan Variabel (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel

dependen. Kriteria sigifikansi variabel untuk teknik analisis regresi linear berganda sama dengan kriteria signifikansi pada teknik analisis regresi linear sederhana. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan nilai signifikansi p. jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen secara statistic signifikan pada level alfa sebesar 5%. Sebaliknya jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,005$, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara statistic tidak signifikan.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui tujuan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu model persamaan regresi linear sederhana sudah tepat. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai $P \leq 0,05$ maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%., sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformalitaskan dalam persamaan

regresi linear berganda sudah tepat. Begitupun sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai $p > 0,05$ maka model persamaan regresinya tidak signifikan pada level alfa sebesar 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda belum tepat. Uji model ini merupakan uji yang harus dipenuhi terlebih dahulu signifikannya sebelum melanjutkan ke uji signifikansi (uji t). Uji F ini bersifat necessary condition yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji signifikansi variabel Chandrarin (2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis, Batas Dan Luas Wilayah

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. Kecamatan Bupon merupakan salahsatu kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu yang memiliki luas 182,67 km² atau sekitar 14,31% dari total keseluruhan luas wilayah Kecamatan Bupon. Kecamatan Bupon berbatasan dengan Kecamatan Ponrang pada sebelah utara, Kecamatan Ponrang Selatan pada sebelah timur, Kecamatan Bajo Barat pada sebelah selatan serta Kecamatan Basse Sangtempe dan Kecamatan Latimojong pada sebelah barat. Kecamatan Bupon terdiri dari 9 Desa dan 1 Kelurahan diantaranya meliputi:

1. Desa Balutan
2. Desa Buntu Batu
3. Desa Malenggang
4. Kelurahan Noling
5. Desa Padang Kamburi
6. Desa Padang Ma'bud
7. Desa Padang Tuju
8. Desa Saluinduk
9. Desa Tampumia
10. Desa Tanjong

4.1.2 Visi Dan Misi Kecamatan Bupon

a. Visi Kecamatan Bupon

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel

b. Misi Kecamatan Bupon

1. Mewujudkan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Bupon
2. Meningkatkan pelayanan prima yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diolah untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi, Moralitas, Dan sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 30 kuesioner untuk memperoleh data berupa tanggapan responden terhadap variabel penelitian. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur desa se-kecamatan Bupon. Data tentang karakteristik responden dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Table 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur/Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	20-29	22	73,3	73,3	73,3	
	30-39	5	16,7	16,7	90,0	
	40-49	2	6,7	6,7	96,7	
	50-59	1	3,3	3,3	100,0	
	Total	30	100,0	100,0		

Sumber: Lampiran, Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden dengan umur/usia 20-29 tahun sebanyak 22 orang atau sekitar 73,3%, responden dengan umur/usia

30-39 sebanyak 5 orang atau sekitar 16,7%, responden dengan umur/usia 40-49 tahun sebanyak 2 atau sekitar 6,7% orang dan responden dengan umur/usia 50-59 tahun sebanyak 1 atau sekitar 3,3% orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi yaitu umur 20-29 tahun.

Tabel 4.2

Karakteristik Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	14	46,7	46,7	46,7
	Perempuan	16	53,3	53,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Dari tabel 4.2 tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis laki-laki sebanyak 14 orang atau sekitar 46,7% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 atau sekitar 53,3% atau dari keseluruhan jumlah responden. Hal ini membuktikan bahwa yang mendominasi yaitu perempuan.

Tabel 4.3

Karakteristik Reponden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	12	40,0	40,0	40,0
	SMA	18	60,0	60,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Dari tabel 4.3 tentang karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 18 orang atau sekitar 60%, responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 12 orang atau sekitar 40%, dan responden yang pendidikan terakhir S2 tidak

memiliki responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

4.2.2 Uji Validitas Dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Dengan menggunakan batuan aplikasi SPSS versi 22, maka pengujian validitas instrumen dapat dilihat pada kolom *correlation* dengan kriteria yaitu :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan/pertanyaan dinyatakan valid
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan/pertanyaan dinyatakan tidak valid

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dilihat hasil olah data uji validitas dibawah ini :

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Kompetensi (X_1)

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Kompetensi	X1.1	0,478	0,361	Valid
	X1.2	0,705	0,361	Valid
	X1.3	0,386	0,361	Valid
	X1.4	0,366	0,361	Valid
	X1.5	0,524	0,361	Valid
	X1.6	0,477	0,361	Valid
	X1.7	0,560	0,361	Valid
	X1.8	0,547	0,361	Valid
	X1.9	0,471	0,361	Valid
	X1.10	0,595	0,361	Valid

Sumber: Lampiran 3, Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel (X) memiliki status valid karena r_{hitung} (Corrected Total Correlation) > lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,361.

Tabel 4.5Uji Validitas Variabel Moralitas (X_2)

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Moralitas	X2.1	0,625	0,361	Valid
	X2.2	0,635	0,361	Valid
	X2.3	0,629	0,361	Valid
	X2.4	0,567	0,361	Valid
	X2.5	0,531	0,361	Valid
	X2.6	0,416	0,361	Valid

Sumber: Lampiran 3, Data Hasil Olah 2022

Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel (X) memiliki status valid karena r_{hitung} (Corrected Total Correlation) > lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,361

Tabel 4.6Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_3)

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Sistem Penengendalian Internal	X3.1	0,693	0,361	Valid
	X3.2	0,654	0,361	Valid
	X3.3	0,740	0,361	Valid
	X3.4	0,682	0,361	Valid
	X3.5	0,569	0,361	Valid
	X3.6	0,796	0,361	Valid
	X3.7	0,371	0,361	Valid
	X3.8	0,502	0,361	Valid
	X3.9	0,680	0,361	Valid
	X3.10	0,583	0,361	Valid

Sumber: Lampiran 3, Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel (X) memiliki status valid karena r_{hitung} (Corrected Total Correlation) > lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,361.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pencegahan *Fraud* (Y)

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Pencegahan <i>Fraud</i>	X3.1	0,410	0,361	Valid
	X3.2	0,575	0,361	Valid
	X3.3	0,496	0,361	Valid
	X3.4	0,541	0,361	Valid
	X3.5	0,574	0,361	Valid
	X3.6	0,584	0,361	Valid
	X3.7	0,794	0,361	Valid

Sumber: Lampiran 3, Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel (X) memiliki status valid karena r_{hitung} (Corrected Total Correlation) > lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,361.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan reliabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten. Metode yang digunakan adalah metode *Cronbach's Alpha*. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka dikatakan reliabel.

Tabel 4.8 1

Hasil Uji Reliabel

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha.</i>	r Standar	Keterangan
1.	Kompetensi (X1)	0,673	0,60	Reliabel
2.	Moralitas (X2)	0,673	0,60	Reliabel
3.	Sistem engendalian internal (X3)	0,831	0,60	Reliabel
4.	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,83	0,60	Reliabel

Sumber: Lampiran 3, Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil *Cronbach's Alpha* dari semua variabel $> 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner penelitian dapat dipercaya sebagai alat ukur dalam menjelaskan variabel Kompetensi (X_1), Moralitas (X_2), Sistem Pengendalian Internal (X_3), dan Pencegahan *Fraud* (Y).

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Linear Berganda

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Kompetensi (X_1), Moralitas (X_2), dan Sistem Pengendalian Internal (X_3) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y) digunakan metode regresi linear berganda. Semua variabel bebas dimasukkan dalam persamaan regresi linear berganda yaitu Kompetensi (X_1), Moralitas (X_2), dan Sistem Pengendalian Internal (X_3). Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui persamaan-persamaan regresi linear berganda. Bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependan (kriterium), bila dua atau lebih variabel independan sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Tabel 4.9 1

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.979	2.855		.693	.493
	x1	.398	.086	.576	4.625	.000
	x2	.541	.121	.479	4.483	.000
	x3	-.076	.064	-.131	-1.182	.245

a. Dependent Variable: Pengendalian Internal (Y)

b. Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka hasil persamaan regresi linear berganda yang didapatkan dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y = 1,979 + 0,398 + 0,541 + (-0,076)$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 1.979 artinya semua variabel independen sama dengan nol maka kinerja aparatur sebesar 1,979 satuan.
2. Nilai koefisien Kompetensi (b1) sebesar 0,398. Artinya setiap ada kenaikan variabel kompetensi (X_1) sebesar satu satuan maka aparatur akan meningkat sebesar 0,398 satuan.
3. Nilai koefisien Moralitas (b2) sebesar 0,541. Artinya setiap ada kenaikan variabel moralitas (X_2) sebesar satu satuan maka kinerja aparatur akan meningkat sebesar 0,541 satuan.
4. Nilai koefisien Sistem Pengendalian Internal (b3) sebesar -0,076. Artinya setiap ada kenaikan variabel sistem pengendalian internal (X_3) sebesar satu satuan maka kinerja aparatur akan menurun sebesar -0,076 satuan.

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinan adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga R-Square. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Internal. Dengan

menggunakan SPSS, diperoleh koefisien determinan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.764	.743	.97048
a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1				
b. Lampiran 5				

Hasil tabel 4.10 menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,764 yang artinya bahwa variabel independen (kompetensi, moralitas, dan sistem pengendalian internal) memberikan pengaruh besar 76,4% terhadap variabel dependen (pencegahan *fraud*), dilihat dari variabel independen terhadap variabel dependen.

4.3.3 Uji t

Uji t digunakan untuk signifikan atau tidaknya suatu pengaruh variabel secara parsial atau variabel dependen. Untuk menguji hipotesis maka terlebih dahulu menentukan kriteria yaitu apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan $< 0,05$ maka hipotesis yang diajukan akan ditolak.

Kemudia dibandingkan dengan hasil signifikan yang telah diolah menggunakan program SPSS output uji t pada tabel berikut :

Tabel 4.11

Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.979	2.855		.693	.493
	x1	.398	.086	.576	4.625	.000
	x2	.541	.121	.479	4.483	.000
	x3	-.076	.064	-.131	-1.182	.245

a. Dependent Variable: Pengendalian Internal (Y)

Sumber: Lampiran 5, Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan nilai uji t yang diperoleh secara persial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi diperoleh t_{hitung} sebesar $4,625 > 1,703$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.
2. Moralitas diperoleh t_{hitung} sebesar $4,483 > 1,703$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.
3. Sistem pengendalian internal diperoleh t_{hitung} $-1,182 < 1,703$ dengan tingkat signifikan $0,245 > 0,05$ berarti sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.

4.3.4 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis akan menggunakan tingkat signifikan sebesar $5\% = 0,05$. Hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS V.22 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	103.478	3	34.493	36.623	.000 ^b
	Residual	32.022	34	.942		
	Total	135.500	37			
a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1 c. Lampiran 5						

Sumber: Lampiran 5, Hasil olah 2022

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai hitung $36,623 > F$ tabel 2,96. Dengan demikian bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara simulat berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari kompetensi, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap penvegahan *fraud* dengan hipotesis yang diajukan oleh penguji diawal penelitian, dengan hipotesis tersebut dapat dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan jenis data kuantitatif, menggunakan data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS V.22, dengan demikian hasil yang ditemukan bahwa :

4.4.1 Kompetensi (X1) Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Frayd* (Y)

Hasil penelitian dan hasil pengujian data yang telah dilakkan peneliti menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017) dan Aulia Putri (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini berhubungan dengan teori *Fraud Triangel* yang menjelaskan tentang kecurangan hanya terjadi saat ada peluang, tekanan keuangan dan pembenaran tindakan *fraud* melalui proses rasionalisasi, yang mana Kompetensi merupakan keterampilan, kapabilitas, dan kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa. Maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang aparatur desa, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa.

4.4.2 Moralitas (X2) Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* (Y)

Hasil pengujian data yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmaja & Saputra (2017) yang menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini berhubungan dengan teori *fraud triangel* yang menjelaskan tentang kecurangan hanya terjadi saat ada peluang, tekanan keuangan dan pembenaran tindakan *fraud* melalui proses rasionalisasi membuktikan adanya pengaruh signifikan moralitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, yang mana Moralitas adalah sifat moral yang dimiliki oleh

manusia sebagai makhluk sosial. Adanya moralitas tinggi yang dimiliki oleh setiap aparatur desa proses berjalannya suatu pekerjaan akan berjalan dengan semestinya.

4.4.3 Sistem Pengendalian Internal (X3) Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* (Y)

Hasil pengujian data yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* berdasarkan hasil uji regresi linear berganda. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Unsur-unsur sistem pengendalian internal yang meliputi : Struktur organisasi memisahkan fungsi dan tanggung jawab dengan ketat dan profesional, Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dirancang untuk melindungi aset, hutang, pendapatan dan pengeluaran, memiliki praktik kerja yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi disetiap unit organisasi, kualitas beberapa karyawan sejalan dengan tugasnya (Mulyadi, 2016).

Penelitian ini berhubungan dengan teori *fraud triangel* yang menjelaskan tentang kecurangan hanya terjadi saat ada peluang, tekanan keuangan dan pembenaran tindakan *fraud* melalui proses rasionalisasi membuktikan adanya pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, yang mana Sistem Pengendalian Internal merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecurangan dengan cara memperkecil peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan *fraud*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian data dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kompetensi aparatur desa memiliki tingkat signifikan diatas 1,703 yaitu sebesar 4,625. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan (Studi kasus pada desa sekecamatan Bupon).
2. Moralitas memiliki tingkat signifikan diatas 1,703 yaitu sebesar 4,483. Hal tersebut menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada desa sekecamatan Bupon).
3. Sistem pengendalian internal memiliki tingkat signifikan dibawah 1,703 yaitu -1,182. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada desa sekecamatan Bupon).

5.2 Saran

1. Bagi aparatur desa di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kompetensi yaitu dengan meningkatkan keinginan belajar dan menambah pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan desa dan teknik pengelolaan keuangan desa agar mengikuti peraturan terbaru dan pedoman yang berlaku.

2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.
3. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja tapi dapat juga dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sebaiknya dilakukan, karena responden dapat menanyakan langsung pernyataan yang kurang atau tidak dipahami.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifiyanto, Dwi Febri., dan Kurrohman, Taufik. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.2, No.3, hal.481-493.
- Ariastuti, N. M., Andayani W, R. D., & Yuliantari, N. P. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada LPD Se-Kecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi dan Keuangan* , 802.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9.
- Aulia, Putri. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal JOM FEB*, Volume 1.
- Dwijayani, S., Sebrina, N. & Halmawati. (2019). *Analisis Fraud Triangle untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada*
- Eka Putra, I. P. A. P., & Latrini, M. Y. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di LPD se-Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2155–2184.
- Fatmawati1). (2021). PENERAPAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF: EFEK PEMBELAJARAN TEORI . *Prosiding 5th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021* , 194-199.
- Furqani, Astri. 2010. “Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance (studi pada pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep).” *UPN Jawa Timur*.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro: Semarang.
- Gustiawan. 2013. “Pengolahan data kependudukan: Menghasilkan laporan data penduduk, masuk, meninggal, lahir, pindah dan laporan umur.” 2013.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1),1–13.
- Jatengprov.go.id. (2020). Berita Daerah Dana Desa Harus Digunakan Sesuai Aturan. Dipetik Januari 20, 2020, dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desa-harus-digunakan-sesuaiaturan>.

- Jihan Fathia, M. I. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 2022, IV*, 457-458.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. CV. Andi. Yogyakarta.
- Karimah, Faizatul. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2. No. 4. Hal.597-602
- Kementrian Keuangan. (2020). Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020.
- Laksmi, dan Sujana. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 26 (3): 2155- 2182
- MADA1, S. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi. 107-113.
- Natasya, T. N., Karamoy, H., & Lambey, R. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Resiko Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Iv Polda Sulut. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2)*, 847–856.
- Oktavia, R. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas,. *Skripsi, 2021*, 1-9.
- Udayani, dan Sari. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 18 (3): 1774-1799.
- Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017*). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Seri D, 445-458
- PUSPITANINGRUM, M. T. (2019). PENGARUH *FRAUD TRIANGLE* sebagai PREDIKTOR Kecurangan. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI, 2019, XXI*, 80-81.
- Pratama, A (2017). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Moderasi Sistem Pengendalian Pemerintah". *Skripsi*.
- Priantara, D. 2013. *Fraud Auditing and Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ramadhan, F. (2016). *SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2016, IXX*, 324-340.

- Ratri, S.W.S. 2018. Pendeteksian Kecurangan pada Pelaporan Keuangan dengan Analisis *Fraud Triangle* (Studi dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *e-Proceeding of Management Telkom University: Vol. 5*, Hlm. 3330-3341
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, W. Robert and Mark Bertozzi. 1998. Principals and Agents : An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting and Financial Management (Fall)*: 325-353
- Subroto, 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. *Tesis : Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegor*
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. *Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta 2012.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press Yusuf, Burhanudin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suparno, E. (2012). Kebijakan dan strategi penempatan tenaga kerja. Dipetik Maret 20, 2021 dari <http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel-3518>
- SYAM, T. W. (2021). TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH. *Skripsi, 2021*, 1-64.
- Utama1, I. G. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM PERSPEKTIF *FRAUD*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.1 (2018)*, 252-259.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2)*, 1–12.
- Widjijanto, H dan Nahartyo., 2008, Penganggaran Partisipatif: Efek Pembelajaran Teori Keagenan dan Penatalayanan terhadap Kinerja Manajer, dengan Sikap dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemeditasi, September: 1-33, Yogyakarta.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD). *E-Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 02, No 02*.

Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Mutliparadigma*, 9(2), 331–345.

Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(2), 63–89.

Wulandari, N. (2021). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KOMITMEN . *SKRIPSI*, 2021, 13-35.

<http://www.antikorupsi.org/>

Yunita, Eka Nur dan Sabaruddinsah, 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja *Manajerial*. *JRAK* Vol.2 No.01 Tahun 2011